



PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jln. Jendral Ahmad Yani Nomor 15 Kel. Pasar III Muara Enim, 3 1 3 1 4

Sumatera Selatan Telp / Fax(0734) 421175

e-mail:diskominfo@muaraenimkab.go.id Website:www.muaraenimkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 13 / KPTS / DISKOMINFO / 2023**

TENTANG

**TIM PELAKSANA DAN PEDOMAN MANAJEMEN PENGETAHUAN
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH KABUPATEN KABUPATEN MUARA ENIM**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan manajemen pengetahuan sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- b. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim dalam pelaksanaan keamanan informasi sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim Tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Mengingat : 1. Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2022 Nomor 3);
7. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2012 Nomor 52).
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2022 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :

Tim Pelaksana dan Pedoman Manajemen Pengetahuan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Muara Enim, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Tim Pelaksana Manajemen Pengetahuan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Muara Enim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

KETIGA : Tim Pelaksana Manajemen Pengetahuan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Muara Enim, sebagai berikut :

No	Kedudukan	Nama/Jabatan
1.	Pembina	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika
3.	Ketua Pelaksana	Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government
4.	Anggota	Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi
5.	Anggota	Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik
6.	Anggota	Kepala Bidang Pengelolaan Data Informasi Publik dan Statistik
7.	Anggota	Pranata Komputer Muda Sub Koordinator Tata Kelola E-Government
8.	Anggota	Pranata Komputer Muda Sub Koordinator Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi
9.	Anggota	Pranata Komputer Muda Sub Koordinator Infrastruktur dan TIK
10.	Anggota	Manggala Informatika Muda Sub Koordinator Keamanan Informasi
11.	Anggota	Sandiman Muda Sub Koordinator Pengawasan dan Evaluasi Persandian

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muara Enim
Pada Tanggal, 2 Januari 2023

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA**



ARDIAN ARIFANARDI, A.P., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 197407201993111001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR : /KPTS/DISKOMINFO/2023
TANGGAL : 2023
TENTANG : TIM PELAKSANA MANAJEMEN
PENGETAHUAN SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH
KABUPATEN MUARA ENIM

PEDOMAN MANAJEMEN PENGETAHUAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengetahuan atau knowledge merupakan informasi yang dapat digunakan untuk membuat keputusan atau mengambil tindakan yang diperlukan. Dengan demikian pengetahuan di dalam organisasi sangatlah penting karena menentukan kualitas tindakan dan keputusan yang diambil, yang dapat mempengaruhi kinerja, daya saing, bahkan keberlangsungan dari organisasi. Agar terhindar dari kerugian yang dapat dialami oleh organisasi, karena sulitnya pengambilan keputusan atau pelaksanaan tindakan sebagai akibat dari tidak tersedianya pengetahuan yang diperlukan, maka pengetahuan di dalam organisasi haruslah dikelola dengan baik. Peran pegawai dalam konteks pengambilan keputusan berbasis pengetahuan sangatlah penting, mengingat pengetahuan organisasi dapat berasal dari individu maupun sekelompok pegawai. Pegawai merupakan modal yang menjadi salah satu komponen utama dari intangible asset serta strategic partner bagi organisasi. Di lain pihak, setiap pegawai cepat atau lambat pasti akan meninggalkan organisasi, atau bermutasi ke unit kerja lain. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk tetap menjaga agar pengetahuan yang dimiliki tetap menjadi aset organisasi, untuk dapat dimanfaatkan selanjutnya oleh pegawai lain atau oleh organisasi tersebut di masa datang. Instansi pemerintahan sebagaimana organisasi lainnya dituntut untuk senantiasa meningkatkan

kinerjanya. Dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) saat ini, pemanfaatan TIK dalam pemerintahan melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pun terus meningkat. SPBE diharapkan dapat memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel; meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama; meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas; dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme. Mengingat kompleksitas dari SPBE, untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi SPBE yang digunakan, diperlukan tata kelola dan manajemen SPBE. Manajemen Pengetahuan dalam SPBE diharapkan dapat mengurangi duplikasi upaya dalam mendapatkan suatu pengetahuan yang diperlukan untuk mengambil keputusan, mengurangi biaya dan waktu operasional layanan SPBE, dan meningkatkan kompetensi operator SPBE. Selain itu dengan manajemen pengetahuan yang baik, diharapkan pegawai dan organisasi pemerintahan dapat diberdayakan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja dan kualitas layanan SPBE.

1.2. Maksud, Tujuan dan Sasaran

Pedoman Manajemen Pengetahuan SPBE dimaksudkan untuk memberikan panduan bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Manajemen Pengetahuan SPBE di lingkungannya.

Tujuan dari Manajemen Pengetahuan SPBE adalah untuk :

- a. Meningkatkan kualitas layanan SPBE; dan
- b. Meningkatnya kualitas pengambilan keputusan dalam SPBE melalui penerapan Manajemen Pengetahuan (mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE).

Manfaat yang diharapkan dari penerapan Manajemen Pengetahuan SPBE di lingkungan organisasi Instansi Pemerintah Daerah adalah

- a. Meningkatnya kinerja individu dan instansi pemerintahan
- b. Meningkatnya efisiensi dari pemanfaatan sumber daya pengetahuan di instansi
- c. Meningkatnya ketahanan serta keberlanjutan proses bisnis dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

1.3. Ruang Lingkup Pedoman

Ruang lingkup Pedoman Manajemen Pengetahuan SPBE meliputi pokok bahasan sebagai berikut:

- a. Konsep Manajemen Pengetahuan SPBE
- b. Kerangka Kerja Manajemen Pengetahuan SPBE;
- c. Proses Manajemen Pengetahuan SPBE;
- d. Struktur Manajemen Pengetahuan SPBE;
- e. Strategi Implementasi Manajemen Pengetahuan SPBE
- f. Forum Koordinasi Manajemen Pengetahuan SPBE
- g. Sistem Informasi Manajemen Pengetahuan SPBE.

BAB II

KONSEP MANAJEMEN PENGETAHUAN

2.1. Definisi

Pengetahuan Pengetahuan atau knowledge dapat diartikan sebagai pemahaman yang dimiliki oleh seseorang mengenai sesuatu hal, yang didapat dari pengalaman (*experience*) dan atau proses pembelajaran (*education*). Pemahaman tersebut selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar dalam membuat keputusan atau melakukan tindakan yang dibutuhkan.

2.2. Manajemen Pengetahuan

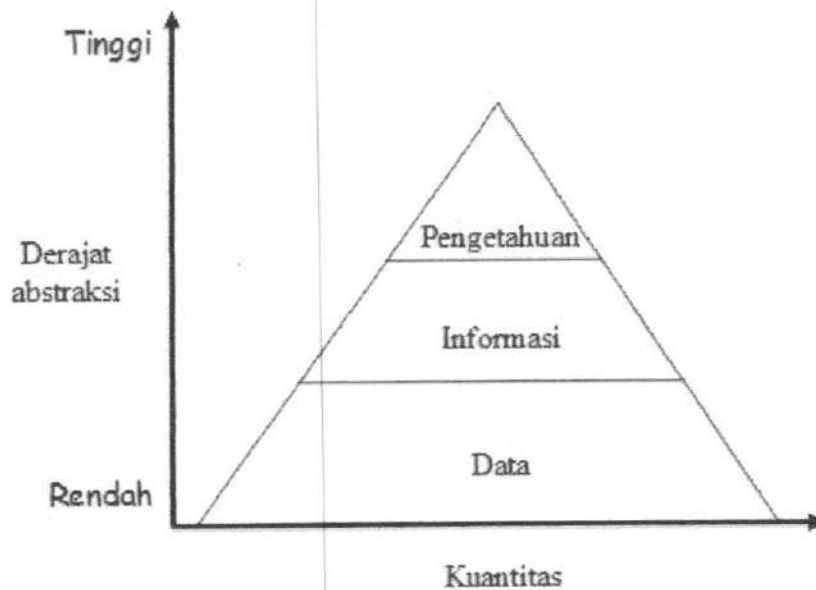
Manajemen pengetahuan adalah upaya terstruktur dan sistematis dalam mengembangkan dan menggunakan pengetahuan yang dimiliki untuk membantu proses pengambilan keputusan bagi peningkatan kinerja organisasi. Aktivitas dalam manajemen pengetahuan meliputi upaya perolehan, penyimpanan, pengolahan dan pengambilan kembali, penggunaan dan penyebaran, serta evaluasi dan penyempurnaan terhadap pengetahuan sebagai aset intelektual organisasi.

2.3. Sistem Manajemen Pengetahuan

Sistem manajemen pengetahuan adalah sistem (yang umumnya berbasis teknologi informasi yang digunakan untuk melakukan pengelolaan atas pengetahuan pada tiap tahapan, baik saat perolehan, penyimpanan, pengambilan kembali, pemanfaatan maupun penyempurnaannya.

2.4. Data, Informasi dan Pengetahuan

Pengetahuan, seringkali dihubungkan dengan data dan informasi, namun secara umum perbedaannya terletak pada kedalaman arti atau makna, sampai dengan relevansi nya terhadap tindakan yang menyertainya. Secara umum keterkaitan data, informasi dan pengetahuan dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 1. Konsep Data, Informasi dan Pengetahuan

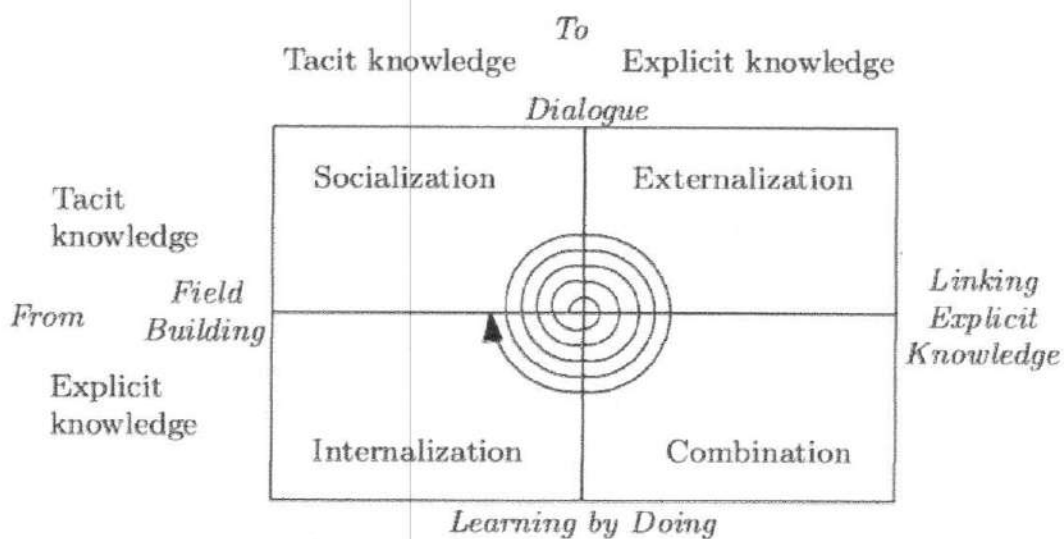
Data adalah bagian terkecil yang merupakan representasi atau kumpulan dari fakta sebagai hasil observasi terhadap suatu kondisi atau kejadian, yang bisa diwujudkan dalam bentuk angka, tulisan atau gambar, dan biasanya tidak memiliki konteks ataupun memiliki arti yang terbatas. Informasi adalah data yang telah diolah dan ditafsirkan sehingga memiliki makna yang bisa berbeda bagi setiap individu. Sedangkan pengetahuan adalah merupakan pemahaman dari kumpulan informasi yang dipergunakan sebagai dasar dalam melakukan aksi.

2.5. Kategori Pengetahuan

Pengetahuan dapat dikelompokkan dalam 2 kategori yaitu pengetahuan eksplisit dan pengetahuan implisit (*tacit*).

- a) Pengetahuan eksplisit, yaitu pengetahuan yang secara eksplisit sudah didokumentasikan dan tersimpan dalam bentuk nyata pada suatu media tertentu, baik dalam bentuk teks ataupun audiovisual. Pengetahuan jenis ini relatif lebih mudah untuk dikelola dan disebarluaskan, contoh yang umum dari pengetahuan eksplisit adalah prosedur, standar kerja, petunjuk penggunaan, atau pun petunjuk penggunaan.
- b) Pengetahuan implisit (*tacit*), yaitu pengetahuan yang masih berada dalam pikiran individu yang memiliki pengetahuan tersebut sebagai hasil dari

pengalaman dan atau proses pembelajaran yang telah dilalui selama ini. Pengetahuan jenis ini relatif lebih sulit untuk dikelola dan disebarluaskan, sangat bergantung pada kemampuan individu dalam memrepresentasikan pengetahuan yang dimilikinya. Manajemen pengetahuan berfungsi untuk dapat mengelola transformasi dari dua jenis kategori pengetahuan diatas secara lebih efisien dan efektif untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dan meningkatkan kinerja organisasi. Secara umum transformasi dari dua jenis pengetahuan diatas dapat digambarkan dalam knowledge spiral sebagai berikut :



Gambar 2. Transformasi Knowledge – SECI Model (Nonaka – Takeuchi)

a. Proses Sosialisasi

Proses sosialisasi pengetahuan adalah proses transformasi pengetahuan secara implisit ke implisit, melalui diskusi atau pun sosialisasi berbagi pengetahuan dan pengalaman untuk menghasilkan pengetahuan baru.

b. Proses Eksternalisasi

Proses eksternalisasi pengetahuan adalah proses transformasi pengetahuan implisit di masing-masing individu kedalam bentuk pengetahuan eksplisit dan menyimpannya dalam suatu media tertentu yang memungkinkan untuk dikelola, diakses dan didesiminasikan.

c. Proses Kombinasi

Proses transformasi knowledge melalui kombinasi adalah proses yang mengkombinasikan berbagai pengetahuan eksplisit yang berbeda untuk menghasilkan pengetahuan eksplisit baru.

d. Proses Internalisasi

Proses internalisasi pengetahuan adalah proses transformasi pengetahuan eksplisit ke pengetahuan implisit di masing-masing individu.

2.6. Sifat Pengetahuan

Pengetahuan bersifat dinamis, baik pada tingkat individu atau pun organisasi pengetahuan selalu bisa bertambah, berkurang atau pun hilang. Pengetahuan akan bertambah seiring dengan bertambahnya pengalaman, ataupun bisa bertambah melalui proses pembelajaran, diskusi, sosialisasi, serta keikutsertaan dalam jejaring sosial. Pengetahuan selain bertambah juga dapat berkurang baik secara kuantitas ataupun kualitasnya seiring dengan berjalannya waktu jika tidak dipelihara dengan baik dan atau tidak dipergunakan. Selain itu pengetahuan juga dapat hilang (knowledge lost), khususnya untuk pengetahuan implisit yang sangat bergantung pada individu pemilik pengetahuan, dapat hilang dikarenakan perpindahan tempat kerja, purnakarya (pensiun), ataupun meninggalnya pemilik pengetahuan. Salah satu fungsi manajemen pengetahuan adalah untuk memastikan bahwa pengetahuan yang dimiliki oleh individu ataupun secara organisasi dapat terpelihara dan terdayagunakan dengan baik, serta menghindari atau memperkecil dampak resiko dari penurunan atau hilangnya pengetahuan dari organisasi.

2.7. Manfaat Manajemen Pengetahuan

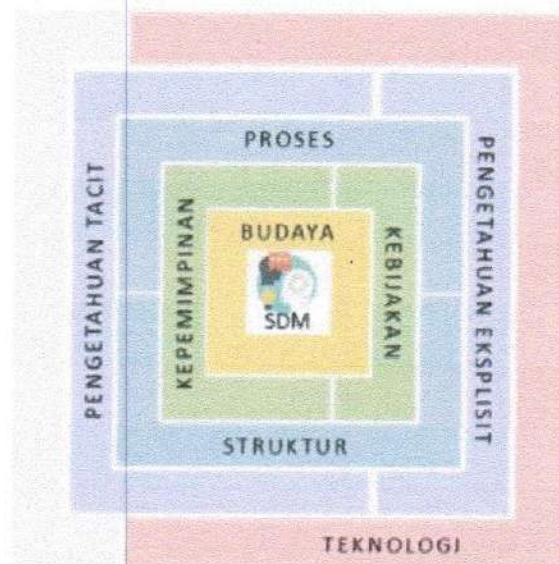
Beberapa manfaat yang diharapkan akan dapat diperoleh dari penerapan manajemen pengetahuan, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Mempercepat akses terhadap pengetahuan organisasi
- b. Meningkatkan kinerja pegawai

- c. Meningkatkan kualitas dan kecepatan dalam pengambilan keputusan
- d. Meningkatkan kualitas dan efektifitas pelayanan
- e. Menciptakan inovasi dan perubahan positif.

2.8. Kerangka Pikir Manajemen Pengetahuan

Kerangka pikir dalam melaksanakan Manajemen Pengetahuan dapat digambarkan dalam ilustrasi berikut, yang menjelaskan sudut pandang dalam membangun proses pengelolaan pengetahuan dalam suatu organisasi, yang berfokus pada SDM sebagai sumber utama penciptaan pengetahuan organisasi. Untuk itu diperlukan budaya kerja yang kondusif, yang memerlukan kepemimpinan (leadership) dan arah kebijakan (direction) di tingkat strategis, serta perlu didukung dengan struktur dan proses pengelolaan di tingkat taktis (manajerial), dalam upaya menumbuhkembangkan pengetahuan baik eksplisit dan implisit, dengan memanfaatkan alat bantu berbasis teknologi informasi dan komunikasi.



Gambar 3. Kerangka Pikir Implementasi Manajemen Pengetahuan

Walaupun teknologi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung penerapan Manajemen Pengetahuan, akan tetapi keberhasilannya tidak hanya bergantung pada ketersediaan teknologi saja. Sebagaimana digambarkan di atas, teknologi hanyalah lapisan luar, sedangkan inti dari Manajemen Pengetahuan adalah bagaimana menumbuhkan budaya kerja yang didukung

dengan kepemimpinan dan kebijakan yang kondusif dalam mengelola pengetahuan organisasi baik pengetahuan eksplisit ataupun implisit. Oleh karena itu setiap pemimpin dan pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah harus menerapkan Manajemen Pengetahuan SPBE dalam setiap pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan SPBE.

BAB III

MANAJEMEN PENGETAHUAN SPBE

3.1. Definisi Manajemen Pengetahuan SPBE

Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas. Manajemen SPBE, terdiri dari :

- a. Manajemen Risiko;
- b. Manajemen Keamanan Informasi;
- c. Manajemen Data;
- d. Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- e. Manajemen Sumber Daya Manusia;
- f. Manajemen Pengetahuan;
- g. Manajemen Perubahan; dan
- h. Manajemen Layanan SPBE.

Salah satu aspek dalam manajemen SPBE di atas adalah Manajemen Pengetahuan, yang merupakan proses pengelolaan pengetahuan SPBE yang dibutuhkan oleh instansi pemerintah, dalam rangka meningkatkan kualitas layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE. Proses manajemen pengetahuan SPBE tersebut, terdiri dari serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.

3.2. Prinsip Manajemen Pengetahuan SPBE

Prinsip utama dalam penerapan Manajemen Pengetahuan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah adalah:

- a. Berorientasi pada penerapan SPBE yang sesuai dengan visi dan misi instansi pemerintahan;
- b. Merupakan bagian dari proses pengambilan keputusan dengan memanfaatkan pengetahuan terbaik yang dikelola;

- c. Memperhatikan faktor manusia, proses bisnis, teknologi, dan budaya organisasi;
- d. Berorientasi pada proses pengumpulan, pengelolaan dan bagi pakai pengetahuan dalam SPBE;
- e. Bersifat transparan, inklusif, sistematis, terstruktur, dan tepat waktu;
- f. Mengutamakan efektifitas, keterpaduan, kesinambungan, efisiensi, akuntabilitas, interoperabilitas dan keamanan;
- g. Bersifat dinamis, berulang atau iteratif, tanggapakan perubahan dan merupakan upaya perbaikan secara terus menerus.

3.3. Kerangka Kerja Manajemen Pengetahuan SPBE

Kerangka kerja Manajemen Pengetahuan bertujuan untuk membantu Pemerintah Kabupaten Muara Enim dalam mengintegrasikan Manajemen Pengetahuan SPBE dalam kegiatan dan pelaksanaan tugas dan fungsinya, yang selanjutnya dapat dikembangkan dan disesuaikan dengan karakteristik Pemerintah Kabupaten Muara Enim masing-masing. Adapun komponen dasar kerangka kerja Manajemen Pengetahuan SPBE dalam rangka mewujudkan pengelolaan pengetahuan SPBE, terdiri dari 3 komponen utama yaitu:

1. Pembangunan Budaya Berbagi dan Meningkatkan Pengetahuan SPBE

Pembangunan budaya yang mendukung pencapaian tujuan manajemen pengetahuan SPBE harus dibangun dan dikembangkan dengan menyesuaikan dengan nilai-nilai budaya di Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Budaya sadar berbagi menjadi hal utama dalam pengelolaan pengetahuan SPBE di Pemerintah Kabupaten Muara Enim, mengingat pengetahuan yang dimiliki oleh individu atau sekelompok individu harus dapat dimanfaatkan bersama untuk kepentingan organisasi. Budaya meningkatkan pengetahuan SPBE perlu dibangun untuk mendorong pola pikir yang berorientasi pada pemecahan masalah, pembangunan kompetensi individu dan peningkatan kinerja organisasi yang dibutuhkan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

Untuk itu membangun suatu lingkungan yang kondusif untuk mendorong terciptanya budaya berbagi dan meningkatkan pengetahuan SPBE di Pemerintah Kabupaten Muara Enim, diperlukan kepemimpinan digital yang memiliki komitmen dalam mengelola pengetahuan, mampu memberi arahan kebijakan yang jelas dan mudah dipahami, serta memberi dukungan secara konsisten dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan pengetahuan organisasi terkait SPBE, membangun *trust* dan mendorong pola pikir serta budaya kerja yang kolaboratif dan inovatif.

Kebijakan mengenai prinsip, proses, dan penugasan secara formal sangat penting untuk memastikan keberhasilan manajemen pengetahuan SPBE di instansi pemerintah. Selain itu, untuk mendorong penerapan manajemen pengetahuan SPBE, perlu dibangun sistem penghargaan terhadap kontribusi ASN dalam pembangunan basis pengetahuan SPBE, baik dalam berbagi pengetahuan maupun berpartisipasi dalam memecahkan masalah dan menciptakan pengetahuan-pengetahuan baru SPBE.

2. Penyelenggaraan Proses Bisnis Manajemen Pengetahuan SPBE

Proses Bisnis Manajemen Pengetahuan SPBE dapat diterapkandenganberpedoman pada siklus generik manajemen pada umumnya, yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan evaluasi danperbaikan, dan secara khusus memenuhi siklus manajemen pengetahuan (*knowledge management life cycle*). Sesuai Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang SPBE proses Manajemen Pengetahuan SPBE terdiri dari proses Pengumpulan, Pengolahan, Penyimpanan, Penggunaan, dan Alih Pengetahuan dan Teknologi.

Proses Manajemen Pengetahuan SPBE harus menjadi bagian yang terpadu dengan proses manajemen secara keseluruhan, menyatudalam budaya, dan disesuaikan dengan proses bisnis organisasi Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Penggunaan teknologi dan sistem informasi manajemen pengetahuan SPBE yang terpusat dan terintegrasi menjadi sarana penting dalam

mendukung terselenggarakannya proses pengelolaan pengetahuan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim secara efektif dan efisien.

3. Pembentukan Struktur Pengelola Manajemen Pengetahuan SPBE

Struktur Manajemen Pengetahuan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim harus dibentuk dan ditetapkan dalam rangka memastikan penugasan yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan SPBE sesuai siklus proses manajemen pada umumnya dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan pengendalian, sampai dengan tindakan perbaikan secara berkelanjutan. Untuk keterpaduan, struktur pengelola manajemen pengetahuan SPBE harus menjadi bagian yang integral dalam tim koordinasi SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

3.4. Ekosistem Manajemen Pengetahuan SPBE

Ekosistem Manajemen Pengetahuan SPBE merupakan suatu tatanan utuh yang memungkinkan tumbuh dan berkembangnya pengetahuan SPBE yang berguna bagi berbagai pihak yang berkepentingan. Ekosistem terdiri dari berbagai komponen atau sub-sistem yang saling berinteraksi satu sama lain, dan dengan lingkungan sekitarnya. Komponen pelaku dalam ekosistem manajemen pengetahuan SPBE, secara garis besar dapat dikelompokkan sebagai berikut.

1. Pelaksana, yang terdiri dari

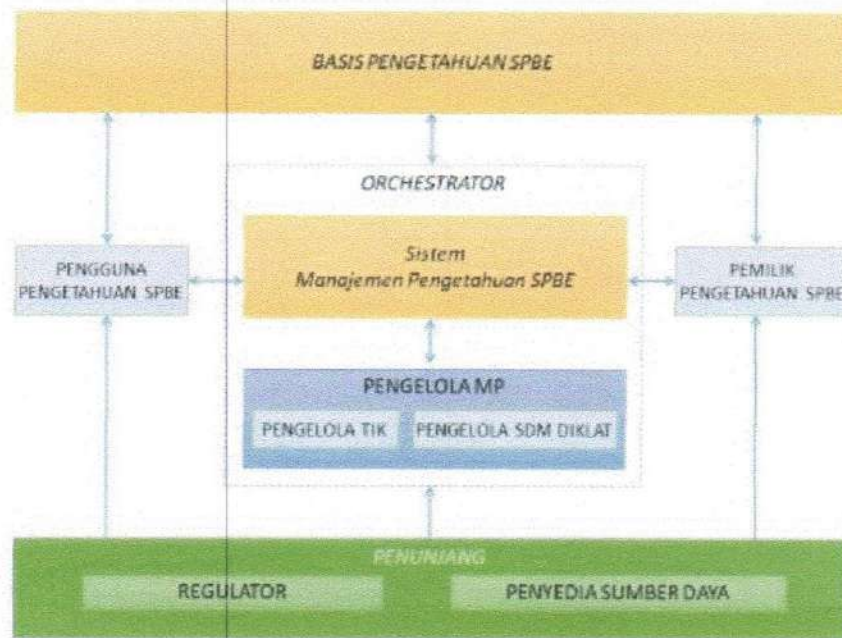
- a. Pemilik pengetahuan SPBE, yang dapat berupa individu maupun organisasi.
- b. Pengguna pengetahuan SPBE, yang dapat berasal dari internal organisasi, maupun eksternal organisasi.
- c. Pengelola proses manajemen pengetahuan SPBE di Pemerintah Kabupaten Muara Enim selain membangun basis pengetahuan SPBE, juga bertugas sebagai orchestrator yang mendorong interaksi dan kolaborasi, untuk menjembatani kebutuhan pengetahuan antara pemilik dan pengguna pengetahuan.

- d. Penyedia teknologi untuk mendukung penerapan manajemen pengetahuan, yang antara lain terdiri dari :
1. Pengelola Knowledge-base atau basis pengetahuan SPBE, yang menyediakan dan memelihara basis pengetahuan SPBE untuk dapat diakses dan digunakan oleh penggunanya, dan/atau
 2. Pengelola alat bantu aplikasi manajemen pengetahuan SPBE, antara lain yang bertugas mengelola dan menyediakan alat bantu untuk mendukung proses-proses manajemen pengetahuan, seperti aplikasi untuk mencari pengetahuan SPBE yang dibutuhkan, berbagi pengetahuan SPBE, penciptaan pengetahuan baru SPBE, dan sebagainya.
- e. Pengelola kompetensi sumber daya manusia, yang berkepentingan dalam melakukan pengembangan kompetensi individu khususnya untuk pendidikan dan pelatihan dalam Instansi Pemerintah. Suatu instansi pemerintah, unit kerja maupun individu tertentu, dapat berperan sebagai pemilik maupun pengguna pengetahuan SPBE, tergantung pada konteks dari pengetahuan SPBE terkait.

2. Pendukung, yang terdiri dari :

- a. Pengelola kebijakan (regulator), dalam hal ini,
 1. Penentu kebijakan dan peraturan terkait penerapan manajemen pengetahuan SPBE; serta
 2. Pengawas, yang mengawasi jalannya aktivitas atau proses manajemen pengetahuan agar sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.
- b. Penyedia sumber daya, termasuk dalam hal ini, sumber daya anggaran, sumber daya fasilitas, serta sumber daya organisasi lainnya di Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Komponen pelaku tersebut di atas berinteraksi dalam suatu ekosistem Manajemen Pengetahuan SPBE, yang ditunjang antara lain dengan nilai-nilai, prinsip, kebijakan, struktur organisasi, proses, sumber daya, sarana dan pra-sarana yang

mendukung fungsi dan tumbuh-kembangnya ekosistem menjadi semakin baik dan bermanfaat. Secara garis besar ekosistem Manajemen Pengetahuan SPBE dapat digambarkan sebagai berikut



Gambar 4. Ekosistem Manajemen Pengetahuan SPBE

3.5. Proses Manajemen Pengetahuan SPBE

Proses-proses dalam siklus manajemen pengetahuan sesuai Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang SPBE dapat dijabarkan sebagai berikut



Gambar 5. Siklus Manajemen Pengetahuan SPBE.

1. Proses Pengumpulan

Pengetahuan terkait SPBE yang biasanya tersebar di instansi pemerintahan, perlu dikumpulkan, untuk selanjutnya dapat disimpan dan dirawat dengan baik. Proses pengumpulan dalam manajemen pengetahuan SPBE perlu dilakukan secara terencana sesuai kebutuhan SPBE.

2. Proses Pengolahan

Pengetahuan SPBE yang telah dikumpulkan perlu diolah, disusun dan diatur dengan baik, untuk memudahkan perawatan serta penggunaannya.

3. Proses Penyimpanan

Pengetahuan SPBE perlu disimpan dalam suatu tempat penyimpanan, yang memungkinkan pemeliharaan pengetahuan tersebut dalam berbagai bentuk representasi pengetahuan.

4. Proses Penggunaan

Pengetahuan SPBE yang telah disimpan, harus senantiasa tersedia dan dapat ditemui, diakses serta digunakan kembali oleh berbagai pihak sesuai tujuan dan kebutuhannya.

5. Proses Alih Pengetahuan dan Teknologi Proses alih pengetahuan dan teknologi terkait SPBE bertujuan untuk memastikan bahwa pengetahuan SPBE dapat dikuasai oleh pihak-pihak yang membutuhkannya dalam rangka pencapaian tujuan SPBE

BAB IV

STRATEGI IMPLEMENTASI MANAJEMEN PENGETAHUAN SPBE

Dalam pelaksanaan penerapan manajemen pengetahuan SPBE di Dinas Komunikasi dan informatika perlu disiapkan strategi serta tahapan yang perlu dilakukan agar manajemen pengetahuan SPBE dapat berjalan dengan baik. Strategi atau tahapan tersebut meliputi pembentukan organisasi, proses perencanaan, proses pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi.

4.1. Penyiapan Pengelolaan

Manajemen Pengetahuan SPBE perlu diterapkan di lingkungan Dinas Komunikasi dan informatika. Dalam menerapkan Manajemen Pengetahuan SPBE perlu penetapan bentuk organisasi yang bertanggung-jawab serta berwenang dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan SPBE di lingkungan instansi pemerintah, yang meliputi pembentukan struktur pelaksana, penyiapan sumber daya, serta penetapan kebijakan internal terkait penerapan Manajemen Pengetahuan SPBE.

4.1.1. Struktur Manajemen Pengetahuan SPBE.

Struktur Manajemen Pengetahuan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, secara garis besar terdiri dari 2 komponen utama yaitu:

1. Komite Pengarah Manajemen Pengetahuan SPBE;

Komite Pengarah terdiri dari pimpinan yang bertugas dan bertanggung jawab untuk:

- a. Menetapkan kebijakan penerapan Manajemen Pengetahuan SPBE;
- b. Memberikan arahan dalam penerapan Manajemen Pengetahuan SPBE;
- c. Mengawasi pelaksanaan Manajemen Pengetahuan SPBE di lingkungan Dinas Komunikasi dan informatika.

Komite Pengarah Manajemen Pengetahuan, sebaiknya terintegrasi dalam Koordinator SPBE di tingkat instansi, dan berperan aktif dalam memberikan arahan dan kebijakan terkait manajemen pengetahuan SPBE, seperti penentuan konteks pengelolaan pengetahuan SPBE di lingkungannya, terlibat langsung dalam perencanaan dan pengendalian manajemen pengetahuan SPBE, maupun terlibat aktif dalam mendorong budaya kerja yang kondusif dalam membangun dan meningkatkan pengetahuan SPBE.

2. Pelaksana Manajemen Pengetahuan SPBE.

Pelaksana Manajemen Pengetahuan SPBE bertugas dan bertanggungjawab dalam:

a. Melakukan koordinasi dalam perencanaan dan evaluasi

Manajemen Pengetahuan SPBE, dengan langkah :

i. Menyiapkan instrumen kebijakan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan, antara lain :

- Pedoman pelaksanaan Manajemen Pengetahuan SPBE

- Rencana kerja Manajemen Pengetahuan SPBE,

- Prosedur kerja yang dibutuhkan dalam pelaksanaan

Manajemen Pengetahuan SPBE;

ii. Melakukan koordinasi dalam melakukan pengukuran, pemantauan dan evaluasi manajemen pengetahuan;

iii. Melakukan koordinasi dalam melakukan pelatihan yang diperlukan dalam implementasi manajemen pengetahuan SPBE.

b. Melakukan koordinasi dalam identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penggunaan serta proses alih pengetahuan dan teknologi SPBE dalam instansi, antara lain dengan :

- i. Melakukan analisa kesesuaian konten pengetahuan yang dikumpulkan;
 - ii. Mendorong interaksi dan komunikasi antara pemilik dan pengguna pengetahuan, baik di dalam instansi maupun antar instansi;
 - iii. Membentuk Komunitas Praktisi SPBE.
- c. Melakukan koordinasi dalam penyediaan fasilitas teknologi untuk Manajemen Pengetahuan SPBE, dengan :
- i. Memastikan tersedianya layanan aplikasi sistem manajemen pengetahuan SPBE untuk instansi;
 - ii. Melakukan pengelolaan teknis terhadap tools / alat bantu sistem manajemen pengetahuan;
 - iii. Berkoordinasi dengan pengelola teknis Sistem Manajemen Pengetahuan SPBE di tingkat Pusat.

4.1.2. Penyiapan Sumber Daya.

Sumber daya merupakan faktor penting agar suatu organisasi dapat menjalankan fungsinya secara teratur dan benar sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Dalam hal sumber daya, organisasi harus menentukan dan menyediakan sumber daya seperti sumber daya manusia (SDM), sarana prasarana teknologi, serta anggaran yang diperlukan untuk mendukung pembentukan, implementasi, pemeliharaan, pengukuran, pelaporan dan peningkatan berkelanjutan dari sistem manajemen pengetahuan.

Kepala Dinas bertugas mengarahkan dan memfasilitasi ketersediaan kebutuhan sumberdaya yang dibutuhkan, untuk keberhasilan pencapaian Manajemen Pengetahuan SPBE sesuai dengan prioritas di Dinas Komunikasi dan informatika. Kebutuhan sumber daya manusia dalam implementasi Manajemen Pengetahuan, antara lain berupa :

- a. Chief Knowledge Officer (CKO), adalah individu yang memiliki visi serta digital leadership yang diperlukan dalam memberikan arahan strategis dan mendorong inisiatif pelaksanaan Manajemen Pengetahuan SPBE di Dinas Komunikasi dan informatika.
- b. Knowledge Managers, adalah individu-individu yang memiliki kemampuan dan pemahaman tentang strategi implementasi Manajemen Pengetahuan, yang diperlukan untuk dapat merintis, menginisiasi, dan mengawasi berjalannya kegiatan Manajemen Pengetahuan SPBE di Dinas Komunikasi dan informatika.
- c. Knowledge Analyst, adalah bagian dari Pelaksana Manajemen Pengetahuan di Dinas Komunikasi dan Informatika yang memiliki kemampuan antara lain dalam :
 - menganalisa kebutuhan dan mengetahui lokasi pengetahuan
 - melakukan kodifikasi pengetahuan
 - mengelola bentuk dan representasi pengetahuan, serta menjaga kemutakhirannya.
- d. Knowledge Systems Engineer, adalah individu-individu yang memiliki kemampuan dalam menyediakan dan mengelola solusi aplikasi pendukung penerapan Manajemen Pengetahuan SPBE. Knowledge Systems Engineer merupakan bagian dari Pelaksana Manajemen Pengetahuan di Dinas Komunikasi dan Informatika.
- e. Knowledge Champions, adalah individu-individu yang memiliki wawasan yang lebih dan sebagai teladan untuk mendorong keterlibatan seluruh Knowledge Workers, dalam membangun basis pengetahuan dan bagi pakai pengetahuan SPBE di Dinas Komunikasi dan Informatika. Knowledge.

Dalam rangka pengembangan kompetensi tersebut, beberapa pelatihan yang dibutuhkan antara lain terkait pemahaman manajemen pengetahuan (*knowledge management awareness*), sampai dengan pelatihan teknik dan alat bantu yang dibutuhkan dalam Manajemen

Pengetahuan SPBE. Ketersediaan sarana dan prasarana teknologi dibutuhkan dalam mendukung proses Manajemen Pengetahuan SPBE harus memenuhi prinsip-prinsip SPBE antara lain mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka (*Open Source Software*) dan interoperabilitas antar sistem. Ketersediaan anggaran yang dibutuhkan dalam implementasi Manajemen Pengetahuan SPBE di instansi sangatlah penting, dan perlu dikelola sesuai peraturan yang berlaku dengan mengutamakan efektifitas, keterpaduan dan efisiensi.

4.1.3. Penetapan Kebijakan Internal.

Kebijakan internal merupakan mekanisme supaya organisasi Manajemen Pengetahuan dapat memperoleh alikasi sumber daya yang dibutuhkan dan dapat berjalan sesuai dengan tujuannya, sehingga pengetahuan SPBE yang diperlukan dapat tersedia secara tepat sasaran pada waktu yang dibutuhkan. Kebijakan internal yang dibutuhkan adalah dan tidak terbatas padahal-hal berikut ini :

- Kebijakan terkait pengembangan dan pemeliharaan Pengetahuan terkait SPBE
- Penetapan organisasi pelaksana Manajemen Pengetahuan SPBE, misalnya dalam bentuk peraturan, keputusan atau sejenisnya.
- Penetapan personil pelaksana Manajemen Pengetahuan SPBE, misalnya dalam bentuk surat penugasan atau sejenisnya.
- Pedoman pelaksanaan Manajemen Pengetahuan SPBE, misalnya dalam bentuk dokumen acuan kegiatan, tata cara pelaksanaan, prosedur kerja, atau sejenisnya, yang antara lain memuat arah kebijakan internal, tujuan penerapan, pihak-pihak yang berkepentingan, strategi pelaksanaan, dan sumber daya yang dibutuhkan dalam penerapan Manajemen Pengetahuan SPBE.

4.2. Proses Perencanaan

Perencanaan Manajemen Pengetahuan SPBE merupakan bagian dalam perencanaan SPBE di lingkungan Instansi Dinas Komunikasi dan Informatika, yang meliputi antara lain penentuan ruang lingkup dan identifikasi pengetahuan SPBE yang dikelola, yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana strategis, peta rencana, serta rencana kegiatan dalam melaksanakan Manajemen Pengetahuan SPBE.

4.2.1. Penentuan Ruang Lingkup Manajemen Pengetahuan SPBE

Ruang lingkup pengetahuan SPBE yang perlu dikelola, pada hakikatnya meliputi seluruh aspek dalam SPBE. Namun dalam penerapannya, dapat dilakukan secara bertahap. Sebagai contoh, ruang lingkup Manajemen Pengetahuan SPBE dapat dikelompokkan sesuai muatan dalam peta rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, antara lain tata kelola SPBE, manajemen SPBE, layanan SPBE, infrastruktur, aplikasi, keamanan informasi dan audit TIK. Ruang lingkup Manajemen Pengetahuan SPBE ini selanjutnya dapat dievaluasi sesuai perkembangan SPBE pada umumnya dan penerapan Manajemen Pengetahuan SPBE pada khususnya.

4.2.2. Identifikasi Kebutuhan Pengetahuan SPBE

Identifikasi pengetahuan SPBE merupakan hal penting yang perlu dilakukan dalam tahap awal perencanaan Manajemen Pengetahuan SPBE. Dalam tahap ini, dilakukan identifikasi pengetahuan-pengetahuan apa saja yang telah dimiliki, ataupun yang belum dimiliki, dan yang diperlukan untuk menunjang pemanfaatan dan pencapaian tujuan SPBE. Pengetahuan tentang SPBE yang dibutuhkan dapat berbentuk tacit atau pengetahuan yang masih berada dalam pemikiran seseorang yang didapat dari pemahaman atau pengalaman terkait SPBE; maupun telah berbentuk explicit yang telah direkam atau didokumentasikan ke dalam suatu bentuk yang dapat diakses dan

dipahami oleh orang lain. Dengan melakukan identifikasi kebutuhan pengetahuan SPBE, diharapkan dapat ditelusuri dan diketahui lokus praktek, entitas, serta individu yang membutuhkan, mampu menciptakan atau memiliki pengetahuan SPBE yang perlu dikelola. Individu pemilik pengetahuan dapat berupa para ahli atau pakar praktisi dalam organisasi. Hal penting dalam melakukan identifikasi pengetahuan adalah menentukan pengetahuan SPBE yang bersifat kritical atau sangat dibutuhkan, dan melakukan prioritas dalam upaya pengelolaannya.

4.3. Proses Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan implementasi manajemen pengetahuan SPBE terdapat langkah-langkah sebagai berikut :

4.3.1. Proses Pengumpulan

Pengetahuan terkait SPBE baik yang bersifat konseptual, operasional/prosedural sampai dengan permasalahan SPBE, perlu dikumpulkan untuk kemudian disimpan, dikelola dan dirawat dalam bentuk atau media yang memberikan kemudahan dalam pencarian, penyebaran dan penggunaannya kembali. Proses pengumpulan pengetahuan baru terkait SPBE dapat dilakukan di seluruh lini proses bisnis di instansi pemerintahan, untuk kemudian diletakkan dalam suatu repository atau tempat penyimpanan yang disebut basis pengetahuan (*knowledge base*) SPBE dalam bentuk terpusat. Proses pengumpulan pengetahuan SPBE dapat dilaksanakan dalam berbagai cara, antara lain sebagai berikut.

1. Proses pengumpulan pengetahuan secara formal

Proses ini dapat berupa proses atau prosedur kerja sehari-hari yang terintegrasi dalam proses pencatatan atau dokumentasi, misalnya yang terkait pengoperasian, pelayanan sampai dengan pengembangan SPBE. Sebagai contoh, pencatatan penanganan

insiden atau permasalahan sistem oleh petugas pelayanan SPBE, dokumentasi pengembangan sistem, atau dokumentasi hasil rapat yang menghasilkan keputusan pemecahan masalah. Proses pengumpulan jenis ini sangat bergantung dari kematangan proses terkait di dalam organisasi.

2. Proses pengumpulan pengetahuan yang terjadi secara informal

Proses ini biasanya bersifat sukarela, melalui diskusi, konsultasi atau tanya jawab permasalahan dengan praktisi atau pakar terkait. Hal ini dapat difasilitasi oleh sistem manajemen pengetahuan, misalnya melalui fasilitas Forum Diskusi SPBE untuk mendorong pengumpulan serta penciptaan pengetahuan SPBE yang dibutuhkan.

Proses pengumpulan pengetahuan SPBE dapat merupakan tahap lanjut dari proses pengelolaan data dan informasi di instansi pemerintah, oleh sebab itu proses pengumpulan pengetahuan sebaiknya difasilitasi sejak awal. Pengumpulan pengetahuan dapat distimulasi sejak pengetahuan masih berbentuk intangible, antara lain dengan cara berdiskusi dengan berbagai pihak yang memiliki pengetahuan tertentu. Selama proses diskusi, informasi yang dipertukarkan diharapkan dapat menstimulir penciptaan pengetahuan baru terkait topik diskusi. Pengetahuan SPBE harus diubah dari bentuk intangible, tacit atau masih berupa data, informasi atau pemahaman yang tidak terstruktur atau belum didefinisikan dalam bahasa formal; menjadi pengetahuan yang berbentuk tangible dan explicit. Dengan kata lain pengetahuan yang dikumpulkan harus dicatat, diartikulasi, dan direpresentasikan dengan baik, agar dapat diserap dan digunakan kembali.

4.3.2. Proses Pengolahan

Pengolahan pengetahuan, dapat pula dilakukan terhadap pengetahuan lama yang telah ada, yang diolah, dimodifikasi atau dibentuk menjadi pengetahuan baru. Representasi pengetahuan SPBE yang baik sangat penting agar dapat dipahami oleh orang lain, serta dapat menjamin pemanfaatan kembali pengetahuan tersebut dalam mendukung pengambilan keputusan dan melakukan tindakan dalam SPBE. Pengetahuan eksplisit SPBE yang dikumpulkan dalam basis pengetahuan (*knowledge base*), perlu dikodifikasi, disusun (*organize*), serta dilengkapi dengan metadata pengetahuan, untuk memudahkan pencarian penggunaannya kembali. Dengan perkembangan teknologi saat ini hal tersebut dapat dilakukan dengan dukungan alat bantu sistem informasi manajemen pengetahuan untuk memudahkan pengolahan pengetahuan SPBE

Tabel 1. Contoh Metadata Pengetahuan SPBE

No	Metadata	Keterangan
1	Nomor ID	Nomor ID Pengetahuan SPBE
2	Judul	Judul atau title dari pengetahuan SPBE
3	Penulis	Penulis atau author adalah nama penulis, penyusun atau pembuatan pengetahuan SPBE
4	Instansi	Instansi penyedia pengetahuan, atau berupa instansi dari penulis pada waktu membuat/menulis pengetahuan

5	Deskripsi	Penjelasan secara naratif dari pengetahuan SPBE
6	Waktu	Waktu penerbitan atau publikasi dari pengetahuan SPBE
7	Format	Bentuk atau media penyimpanan dari pengetahuan SPBE, misalnya tulisan, gambar, audio, video
8	Lingkup	Lingkup SPBE atau kategori, adalah pengelompokan pengetahuan SPBE sesuai aturan, kebijakan atau rancangan yang disepakati, misalnya arsitektur SPBE, pemantauan dan evaluasi SPBE, manajemen layanan SPBE, manajemen pengetahuan SPBE, audit TIK dan sebagainya
9	Label	Label atau tags (taggings) dari adalah frasa atau kata kunci dari pengetahuan SPBE untuk memudahkan pencarian kembali
10	Kontributor	Kontributor, atau nama pendukung yang memberikan kontribusi pada penulis dalam menyusun pengetahuan SPBE. Kontributor bisa berjumlah lebih dari satu

11	Status publikasi	Publikasi untuk umum (masyarakat), atau terbatas untuk internal ASN dan pengguna
12	URL	Tautan lokasi pengetahuan SPBE

4.3.3. Proses Penyimpanan

Pengetahuan SPBE memerlukan suatu tempat penyimpanan (*knowledge base repository*). Tempat dan struktur penyimpanan pengetahuan SPBE tersebut perlu didesain sedemikian rupa sehingga memenuhi kebutuhan, baik dari sisi kapasitas, fungsionalitas penyimpanan, maupun dari kebutuhan ketepatan dan kecepatan (*performansi*) saat pencarian dan pengaksesan pengetahuan di tempat penyimpanan pengetahuan. Perkembangan teknologi saat ini memungkinkan penyimpanan media pengetahuan secara elektronik yang tidak terbatas pada bentuk tulisan (*text*), tetapi juga bentuk gambar dan suara, bentuk statis maupun dinamis (*video animasi*), yang dapat digunakan untuk merepresentasikan informasi dan pengetahuan yang telah dikumpulkan. Penyimpanan pengetahuan instansi sebaiknya dilakukan secara terpusat pada Pusat Data Nasional dengan memanfaatkan teknologi komputasi awan (*cloud*), sehingga memudahkan dalam menyediakan layanan secara berbagi pakai.

4.3.4. Proses Penggunaan

Pengetahuan SPBE dapat digunakan untuk mendukung efektifitas dan efisiensi dalam penyediaan dan penggunaan layanan SPBE, maupun untuk mendukung pengambilan keputusan terkait SPBE. Untuk itu pengetahuan SPBE harus senantiasa tersedia untuk digunakan, baik untuk pembelajaran, penanganan masalah, sampai dengan berinovasi dalam pengoperasian sistem, perawatan, evaluasi, perencanaan serta

pengembangan sistem atau layanan baru SPBE. Pengetahuan SPBE yang telah ada pun dapat digunakan kembali, dilengkapi, diperbaiki atau dikombinasikan dengan pengetahuan SPBE lainnya untuk menjadi pengetahuan baru. Pengukuran efektifitas penggunaan pengetahuan perlu dilakukan, dan menjadi masukan dalam pemantauan dan evaluasi penerapan manajemen pengetahuan yang dilaksanakan di Institusi Pusat dan Pemerintah Daerah.

4.3.5. Proses Alih Pengetahuan dan Teknologi

Proses alih pengetahuan dan teknologi, atau transfer technology terkait SPBE adalah proses pemindahan pengetahuan dan tatacara terkait SPBE dari satu atau sekelompok individu ke individu lainnya. Proses transfer teknologi SPBE tersebut bertujuan untuk memastikan pengetahuan dan teknologi tersebut dapat diserap atau dipahami oleh penerima nya, sedemikian rupa sehingga pengetahuan tersebut dapat digunakan untuk mengambil keputusan atau melakukan aksi.

4.4. Proses Pemantauan dan Evaluasi

Pengendalian proses Manajemen Pengetahuan SPBE dilakukan dengan memperhatikan pelaksanaan prinsip-prinsip Manajemen Pengetahuan SPBE, pemenuhan dan peningkatan kapabilitas serta kematangan proses Manajemen Pengetahuan, serta efektifitas dalam implementasi Manajemen Pengetahuan dalam mencapai tujuan SPBE. Proses pengawasan Manajemen Pengetahuan SPBE dilaksanakan secara terintegrasi dengan proses pemantauan dan evaluasi SPBE serta audit TIK SPBE sesuai peraturan yang berlaku.

4.4.1. Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan SPBE

Kematangan penerapan Manajemen Pengetahuan SPBE, sesuai PermenPANRB nomor 59 tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE dapat diukur berdasarkan kriteria berikut ini.

Tingkat 1 - RINTISAN	
Manajemen Pengetahuan SPBE belum atau telah diterapkan. Kondisi : Manajemen Pengetahuan SPBE diterapkan tanpa Perencanaan	
Tingkat 2 - TERKELOLA	
Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan dilaksanakan dengan perencanaan Kondisi : Manajemen Pengetahuan SPBE telah dilaksanakan tanpa pedoman di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	
Tingkat 3 - TERDEFINISI	
Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi Manajemen Pengetahuan SPBE dilaksanakan dengan : Mengacu pada pedoman di IPPD dan Manajemen Pengetahuan SPBE Diterapkan dengan menggunakan sistem aplikasi manajemen pengetahuan	
Tingkat 4 - TERPADU DAN TERUKUR	
Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi Semua UK/PD telah menerapkan Manajemen Pengetahuan SPBE dengan menggunakan sistem aplikasi manajemen pengetahuan yang terintegrasi, serta Telah dilakukan reviu dan evaluasi terhadap penerapan Manajemen Pengetahuan SPBE	
Tingkat 5 - OPTIMUM	
Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta, Hasil reviu dan evaluasi terhadap penerapan Manajemen Pengetahuan SPBE telah ditindaklanjuti melalui perbaikan Manajemen Pengetahuan SPBE.	

Sesuai dengan penjelasan di atas, tingkat kematangan Manajemen Pengetahuan SPBE bergantung pada aspek-aspek tata kelola seperti budaya, kepemimpinan dan kebijakan internal yang jelas dan kondusif, struktur pengelolaan yang optimal, penyelenggaraan proses Manajemen Pengetahuan yang efektif, efisien dan berkesinambungan, serta dukungan teknologi dan sumber daya yang memadai. Pengukuran tingkat kematangan Manajemen Pengetahuan sangatlah penting dan menjadi acuan untuk mendukung perencanaan dan perbaikan ke depan.

4.4.2. Pengukuran Efektifitas Implementasi

Melakukan pengukuran efektifitas implementasi Manajemen Pengetahuan SPBE bukan lah hal yang mudah. Untuk mendapatkan korelasi langsung antara pelaksanaan proses Manajemen Pengetahuan SPBE, kualitas basis pengetahuan yang terbangun dan termanfaatkan, serta peningkatan kualitas layanan SPBE dan kualitas pengambilan keputusan dalam SPBE merupakan suatu tantangan tersendiri bagi pengelola Manajemen Pengetahuan SPBE.

Beberapa pendekatan sederhana dalam melakukan pengukuran efektifitas implementasi Manajemen Pengetahuan SPBE adalah melalui pengukuran kuantitatif sebagai indikator aktifitas proses sebagai berikut :

1. Aktifitas pencarian pengetahuan SPBE

Pengukuran aktifitas pencarian pengetahuan SPBE yang dapat memberi gambaran tentang kebutuhan pengetahuan SPBE oleh pengguna, antara lain sebagai berikut :

- Jumlah permintaan pencarian pengetahuan SPBE, berdasarkan lingkup, lokasi, unit kerja, maupun waktu.
- Pengetahuan SPBE yang paling banyak dicari atau diminta oleh pengguna berdasarkan lokasi, unit kerja, maupun waktu.

2. Aktifitas penciptaan pengetahuan

Pengukuran aktifitas penciptaan pengetahuan (eksplisit) untuk dibagi-pakai yang dapat memberikan gambaran tentang pengembangan basis pengetahuan SPBE di suatu instansi, antara lain sebagai berikut :

- Jumlah dan pertumbuhan artikel atau representasi pengetahuan SPBE baru yang terkumpul berdasarkan lokasi, unit kerja, maupun waktu.
- Jumlah artikel atau representasi pengetahuan SPBE dari pakar atau ahli bidang tertentu, termasuk pegawai yang mendekati masa pensiun.

3. Aktifitas berdiskusi dan berbagi pengalaman

Pengukuran aktifitas berdiskusi dan berbagi pengalaman yang dapat memberikan gambaran tentang efektifitas proses penciptaanpengetahuan yang dibutuhkan secara kolektif, antara lain sebagai berikut :

- Jumlah pertanyaan atau permasalahan SPBE yang disampaikan dalam diskusi
- Jumlah jawaban, respon atau komentar atas pertanyaan atau permasalahan SPBE yang dibahas dalam diskusi
- Jumlah individu yang mengajukan pertanyaan terkait SPBE
- Jumlah individu yang memberikan jawaban, respon atau komentar terhadap pertanyaan terkait SPBE.

BAB V

PENUTUP

Manajemen Pengetahuan merupakan salah satu unsur dalam SPBE, yang diperlukan dalam pencapaian tujuan dan keberlangsungan SPBE. Untuk itu perlu dibangun budaya berbagi pengetahuan, dalam suatu ekosistem Manajemen Pengetahuan SPBE yang terpadu dan berkelanjutan. Penerapan Manajemen Pengetahuan SPBE tidak dapat dilakukan secara terpisah, namun bergantung pada tatakelola dan manajemen SPBE secara keseluruhan. Untuk itu integrasi seluruh elemen SPBE, termasuk integrasi Manajemen Pengetahuan ke dalam sistem dan proses-proses bisnis yang telah berjalan, menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan Manajemen Pengetahuan SPBE. Pedoman Manajemen Pengetahuan SPBE diharapkan dapat digunakan sebagai acuan pelaksanaan penerapan Manajemen Pengetahuan SPBE di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim. Dan untuk keberhasilan implementasinya, diperlukan dukungan dan peran serta seluruh pihak di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim.